

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desentralisasi merupakan salah satu strategi yang diharapkan dapat membantu daerah otonom yang efisien, efektif, akuntabel dan berkesinambungan. Dengan adanya kebijakan desentralisasi dapat memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk terus meningkatkan taraf hidupnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan sistem pemerintahan yang berubah dari sentralistik menjadi desentralisasi memberi pengaruh yang besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kerja pada umumnya sehingga memberikan dampak yang positif juga bagi pengaturan sistem keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diharapkan mampu mengelola potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya keuangan secara optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Dengan diberlakukannya undang-undang tentang Otonomi daerah ini seharusnya pemerintah dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Kemudian otonomi daerah ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menggali

kenekaragaman daerahnya, dan potensi daerahnya secara luas. Untuk itu, kesiapan daerah untuk melaksanakan Undang-undang tentang Otonomi Daerah perlu didukung oleh sumberdaya manusia dan perangkat kelembagaan yang representatif.

Dengan demikian untuk menilai seberapa besar potensi daerah dalam mengelola rumah tangganya daerahnya dapat tercermin dalam Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pemerintah daerah juga digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerahnya. Belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai kewajiban daerah yang diwujudkan melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti di Badan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bandung, peneliti menemukan permasalahan yang berkaitan dengan belanja langsung. Dapat dijelaskan melalui target dan realisasi anggaran pada setiap tahunnya persentasenya menunjukkan keadaan yang cenderung

fluktuatif. Hal ini sesuai dengan data mengenai target dan realisasi Belanja Daerah di kabupaten bandung dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Anggaran Belanja Daerah tahun 2013-2018**

<b>TAHUN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSENTASE</b>
2013	3.556.435.069.635,98	3.242.165.132.570,50	91,16%
2014	4.340.959.468.801,78	3.823.064.504.314,00	88,07%
2015	5.142.388.330.904,74	4.607.334.886.117,81	89,60%
2016	5.090.337.098.276,41	4.640.192.716.482,49	91,16%
2017	5.513.502.899.816,32	4.911.935.675.829,26	89,09%
2018	5.765.774.401.420,85	5.114.895.616.105,50	88,71%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018 Pemkab Bandung (Data Diolah).*

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa realisasi anggaran belanja daerah tertinggi terdapat pada tahun 2013 dan 2016 sebesar 91,16%, selanjutnya realisasi terendah terdapat pada tahun 2014 sebesar 88,07%, artinya belanja daerah tidak mencapai target setiap tahunnya. Realisasi anggaran sendiri merupakan tolak ukur kinerja keuangan suatu instansi atau lembaga yang dimana apabila tidak mencapai target maka kinerja keuangan suatu daerah belum dapat mengelolanya dengan baik.

Belanja daerah dibagi menjadi dua yang belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal untuk program dan kegiatan yang ada pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adanya isu strategis yang menyebabkan belum optimalnya realisasi anggaran belanja langsung, seperti adanya kegiatan atau program yang tidak terlaksana. Berikut disajikan data target dan realisasi Belanja tidak langsung dan tidak langsung di Kabupaten Bandung tahun 2013-2018:

**Tabel 1.2**  
**Proporsi belanja langsung dan tidak langsung dalam belanja daerah**  
**pada tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja tidak langsung</b>	<b>Proporsi</b>	<b>Belanja langsung</b>	<b>Proporsi</b>
2013	1.938.719.940.170,00	59,80%	1.303.445.192.400,50	40,20%
2014	2.196.885.719.863,00	57,46%	1.626.178.784.451,00	42,54%
2015	2.546.255.642.757,00	55,27%	2.061.079.243.360,81	44,73%
2016	2.685.262.504.115,00	57,87%	1.954.930.212.367,49	42,13%
2017	2.545.069.096.889,00	51,81%	2.366.866.578.940,26	48,19%
2018	2.646.533.400.829,00	51,74%	2.468.362.215.276,50	48,26%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018 Pemkab Bandung (Data Diolah).*

Berdasarkan tabel diatas, terlihat perbandingan proporsi belanja tidak langsung masih terbilang cukup besar dibanding dengan belanja langsung. Walaupun proporsi belanja langsung mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat setiap tahunnya, namun proporsinya cenderung masih rendah dibanding belanja tidak langsung. Realisasi belanja langsung paling tinggi terdapat pada tahun 2018 sebesar 48,26%, dan belanja langsung paling rendah terdapat pada tahun 2013 sebesar 40,20%.

Anggaran belanja langsung seharusnya bisa lebih besar daripada anggaran belanja tidak langsung karena belanja langsung merupakan belanja yang dilaksanakan secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan dan untuk kepentingan publik.

Peranan Pendapatan Asli Daerah menjadi sangat penting dalam kegiatan otonomi daerah sebagai salah satu sumber keuangan pemerintah daerahnya. Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah semakin besar seiring semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Masih rendahnya kontribusi PAD Kabupaten Bandung terhadap pendapatan daerah mengakibatkan tingkat ketergantungan masih tinggi terhadap dana perimbangan. Mengutip dari berita pikiran rakyat, Yayat Hidayat (Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung) mengatakan, “Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Bandung hanya berkisar naik puluhan miliar pertahunnya. Dengan adanya tunjangan kinerja yang dibayarkan mulai tahun 2018 seluruh PAD habis untuk pembayaran tunjangan tersebut. Padahal potensi di Kabupaten Bandung sangat besar khususnya di sektor pariwisata, seharusnya pemkab Bandung harus kreatif sehingga mendapatkan PAD dari pariwisata itu. Harus ada pendekatan insentif agar pemkab Bandung tak sebatas menonton ketika pariwisata mulai ramai dengan adanya jalan tol Soreang-Pasirkoja.” (Pikiran Rakyat, 14 Februari 2018).

Berikut disajikan data proporsi Pendapatan Asli daerah terhadap pendapatan daerah kabupaten abndung tahun 2012-2018 :

**Tabel 1.3**

**Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013-2018**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>Proporsi</b>
2013	3.368.043.981.175,50	507.243.684.130,50	15,06%
2014	4.038.777.825.787,08	702.045.372.759,08	17,38%
2015	4.476.817.591.835,60	784.216.215.215,60	17,52%
2016	4.607.667.368.913,37	856.512.240.274,37	18,59%
2017	5.081.260.297.655,24	1.288.971.770.680,24	25,37%
2018	5.259.974.811.369,26	927.543.321.132,26	17,63%

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018 Pemkab Bandung (Data Diolah).*

Berdasarkan tabel diatas, realisasi proporsi pendapatan asli daerah selama enam tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dari data diatas bahwa kontribusi Pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2018 kontribusi Pendapatan asli daerah kabupaten bandung cenderung menurun dan hanya memperoleh kontribusi sebesar 17,63% saja dibandingkan tahun 2017 sebesar 25,37%. Hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam bentuk penerimaan PAD masih belum dapat terpenuhi. Ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam bentuk transfer dan perimbangan. Kontribusi pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu pendapatan transfer.

Berdasarkan penjelasan keterkaitan antara variabel diatas dan perbandingan antara data faktual dengan teori yang ada, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung Tahun 2013 – 2018”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Ketergantungan keuangan pemerintah Daerah Kota Bandung masih didominasi oleh transfer pusat.
2. Belum optimalnya penggalian mengenai potensi pendapatan asli daerah di kabupaten bandung.
3. Proporsi belanja langsung masih rendah dibanding belanja tidak langsung.
4. Masih belum optimalnya penyerapan anggaran belanja langsung. Realisasi dan target pencapaian anggaran belanja daerah tidak mencapai pagu anggaran yang telah ditentukan sebelumnya.

### **1.3 Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap belanja Langsung di kabupaten Bandung?
- 2 Seberapa besar pengaruh retribusi daerah terhadap belanja Langsung di kabupaten bandung?
- 3 Seberapa besar pengaruh Lain-lain PAD yang saha terhadap belanja Langsung di kabupaten bandung?
- 4 Seberapa besar pengaruh PAD terhadap Belanja Langsung di kabupaten bandung?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung pada tahun 2013-2018.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengharapkan ada beberapa manfaat dari penelitian ini mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Teoritis**

- a. Bagi peneliti kegunaan dari penelitian ini yaitu untuk menerapkan teori-teori atau ilmu yang telah dipelajari serta mengembangkan pemikiran terhadap ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara.
- b. Bagi lembaga diharapkan dengan penelitian ini dapat memperkaya serta menambah pengetahuan dan ilmu yang berkaitan dengan ilmu Administrasi Publik dalam hal pengelolaan keuangan negara.
- c. Kegiatan penelitian ini diharapkan menambah wawasan serta pengetahuan baru bagi pegawai dalam menjalankan programnya.

##### **2. Praktis**

- a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari dalam praktek yang sesungguhnya serta memperdalam wawasan serta



pengetahuan yang berkaitan dengan adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung.

b. Bagi Universitas

Diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi dan studi pustaka untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Langsung pemerintahan.

c. Bagi pemerintah/instansi yang terkait

Diharapkan penelitian ini dapat membantu pihak pemerintah dalam mewujudkan upaya-upaya untuk meningkatkan dalam hal menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan dalam Belanja Langsung.

d. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut dalam media pembelajaran dan menjadi nilai tambah bagi khasanah pengetahuan ilmiah.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) disusun dengan melihat kebutuhan yang diperlukan pemerintah daerahnya dan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diterima.

Menurut Baldrick (2015:31), belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal yang

merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

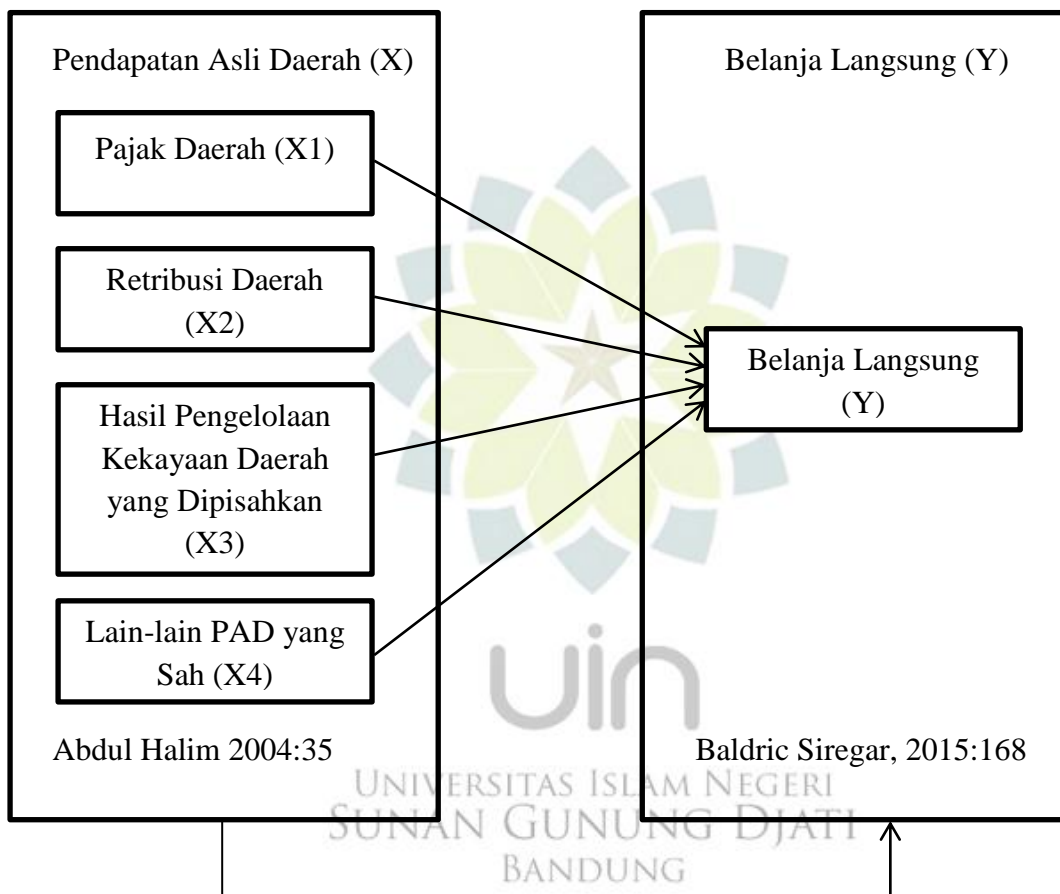
Halim (2004:94) mengatakan bahwa : “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Dengan demikian, optimalisasi dalam pengelolaan dari aspek-aspek yang ada pada Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembiayaan belanja daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas maka yang akan menjadi model dalam penelitian ini dapat dilihat dari skema yang digambarkan dibawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Model Penelitian**



### 1.7 Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hipotesis asosiatif atau korelasional yang mana pernyataan yang menduga suatu hubungan antara dua variabel. Menurut Silalahi (2012:168) mengemukakan hipotesis asosiatif yaitu:

”Hipotesis asosiatif atau kovariasional atau korelasional merupakan hipotesis yang menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih variabel, tetapi

selain tidak mengindikasikan arah hubungan juga tidak menunjukkan nama yang menjadi variabel sebab dan mana yang menjadi variabel akibat. Meskipun kita mengatakan ada hubungan yang signifikan antara dua variabel, kita tidak dapat mengatakan apakah hubungan positif atau negative.”

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh secara parsial Pajak daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial Pajak daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh secara parsial Retribusi daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial Retribusi daerah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung.

Ho : Tidak terdapat pengaruh secara parsial Lain-lain PAD yang Sah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung.

Ha : Terdapat pengaruh secara parsial Lain-lain PAD yang Sah terhadap Belanja Langsung di Kabupaten Bandung.